

**KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG  
DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT DI PULAU KECIL  
STUDI DI PULAU PAHAWANG, PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**A. Velda Reissa Valeska  
1814151020**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT DI PULAU KECIL STUDI DI PULAU PAHAWANG, PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**A. Velda Reissa Valeska**

Keberadaan wilayah yang dilindungi di pulau kecil memiliki peran penting bagi masyarakat setempat. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah, kelembagaan, kepercayaan masyarakat serta persepsi masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah wilayah tersebut, kelembagaan, kepercayaan masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap wilayah yang dilindungi di Pulau Pahawang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul diolah menggunakan Skala Likert untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keberadaan wilayah, kelembagaan, dan potensi wisata dari wilayah yang dilindungi oleh masyarakat. Selanjutnya data terkait sejarah, kelembagaan, dan folklor dianalisis secara kualitatif, sedangkan data terkait persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sejarah dilindunginya wilayah tersebut karena pernah terjadi longsor pada zaman dahulu serta terdapat makam yang dikeramatkan. Kelembagaan yang ada berupa kesepakatan informal antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melindungi Puncak Keramat yang dibuat pada tahun 1977 dan dipatuhi masyarakat sampai saat ini. Kesepakatan tersebut juga didukung oleh kepercayaan yang berkembang di masyarakat apabila merusak wilayah tersebut akan mendapatkan celaka. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan wilayah yang dilindungi tergolong tinggi. Masyarakat menyadari keberadaan hutan tersebut sangat penting secara ekologi, namun belum dimanfaatkan dengan optimal secara ekonomi. Persepsi terhadap kelembagaan juga tergolong tinggi. Wilayah yang dilindungi ini berpotensi dijadikan wisata religi, dimana hasil persepsi masyarakat tergolong tinggi. Pemerintah desa perlu melakukan perencanaan wisata religi yang baik dan peningkatan sarana dan prasarana sehingga pengelolaan wilayah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fungsi perlindungannya tetap terjaga.

**Kata kunci:** kelembagaan, folklor, persepsi masyarakat, wilayah yang dilindungi, pulau kecil, wisata.

## ABSTRACT

### INSTITUTIONS IN PROTECTED FOREST MANAGEMENT BY COMMUNITY ON A SMALL ISLAND STUDY ON PAHAWANG ISLAND, LAMPUNG PROVINCE

By

A. Velda Reissa Valeska

*The existence of a protected area on a small island has an important role for the local community. This is also closely related to history, institutions, community beliefs and perceptions of the surrounding community. This study aims to find out how the history of the area, institutions, public trust, and public perceptions of the protected area on Pahawang Island. Data was collected by observation, interviews using questionnaires, in-depth interviews, and documentation studies. The collected data is then processed using a Likert Scale to measure people's perceptions of the existence of areas, institutions, and tourism potential from areas protected by the community. Furthermore, data related to history, institutions, and folklore were analyzed qualitatively, while data related to public perception were analyzed descriptively. The results of the study show that the history of the area was protected because there had been landslides in ancient times and there were also sacred tombs there. The existing institution is an informal agreement between the village government and the community to protect Puncak Keramat which was made in 1977 and has been adhered to by the community to this day. The agreement is also supported by a growing belief in the community about the harm that will be received if it destroys the area. Public perception of the existence of protected areas is high. The community realizes that the existence of the forest is very important ecologically, but has not been used optimally economically. Perceptions of institutions are also high. This protected area has the potential to be used as religious tourism, where the results of public perception are quite high. The village government needs to plan good religious tourism and improve facilities and infrastructure so that the management of this area can improve the welfare of the community and its protection function is maintained.*

**Keywords:** *institutions, folklore, public perception, protected areas, small islands, tourism.*

**KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG  
DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT DI PULAU KECIL  
STUDI DI PULAU PAHAWANG, PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**A. Velda Reissa Valeska**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**Pada**

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT DI PULAU KECIL STUDI DI PULAU PAHAWANG, PROVINSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa : A. Velda Reissa Valeska

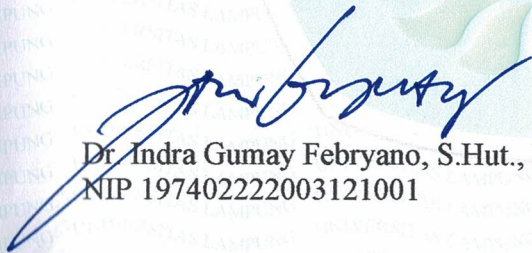
Nomor Pokok Mahasiswa : 1814151020


Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

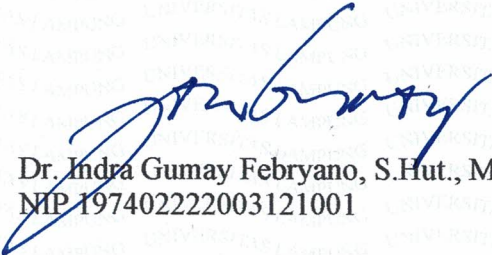


1. Komisi Pembimbing

  
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.  
NIP 197402222003121001

  
Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP 198307162005012001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

  
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.  
NIP 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

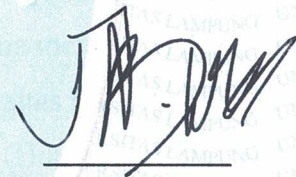
**Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**



**Sekretaris : Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.**




**Anggota : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Iwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
**NIP. 196110201986031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Mei 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Velda Reissa Valeska

NPM : 1814151020

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG  
DILINDUNGI OLEH MASYARAKAT DI PULAU KECIL STUDI PULAU  
PAHAWANG, PROVINSI LAMPUNG.”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022

Yang menyatakan



**A. Velda Reissa Valeska**

NPM 1814151020

## RIWAYAT HIDUP



A. Velda Reissa Valeska (Penulis) atau akrab disapa Velda, lahir di Bekasi, 27 Januari 2001. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Kinsia Abdul Salam dan Rina Widiyati. Pendidikan yang ditempuh penulis di Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Ibu tahun 2005-2006, Sekolah Dasar (SD) di SDN Pengasinan VIII tahun 2006-2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 244 Jakarta tahun 2012-2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 75 Jakarta tahun 2015-2018.

Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Unila melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi anggota organisasi BEM Universitas Lampung dan aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva) FP Unila. Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Manajemen Kehutanan Semester Ganjil 2020/2021 dan Semester Genap 2020/2021, Hidrologi Hutan Semester Ganjil 2020/2021, dan Kewirausahaan Semester Genap 2020/2021.

Penulis mengikuti kegiatan KKN selama 40 hari di Kelurahan Pengasinan, Bekasi, Jawa Barat pada bulan Februari-Maret 2021. Selain itu penulis juga mengikuti kegiatan Praktik Umum (PU) di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung (BPDASHL WSS) pada bulan Agustus 2021 selama 20 hari. Penulis memiliki makalah dengan judul “Bagaimana Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Wilayah yang Dilindungi di Pulau Pahawang?” yang telah diterbitkan di *Journal of Tropical of Marine Science*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu penulis juga mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Kelembagaan Lokal dalam



Menjaga Wilayah yang Dilindungi di Pulau Pahawang” pada Seminar Nasional Inovasi Penelitian Mahasiswa Kehutanan Indonesia tahun 2022.

*Karya tulis ini kupersembahkan khusus untuk kedua orang tuaku  
tersayang, Ibunda Rina Widiyati dan Ayahanda Kinsia Abdul Salam*

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah yang Dilindungi oleh Masyarakat di Pulau Kecil Studi Kasus Pulau Pahawang” merupakan salah syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Kehutanan di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan baik dengan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyusunan skripsi.

6. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
7. Segenap perangkat Desa dan masyarakat Pulau Pahawang yang telah mengizinkan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.
8. Orang tua Penulis yaitu Ibu Rina dan Bapak Kinsia yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi serta selalu mendoakan tanpa henti.
9. Riki Aryaputera Arkananta, selaku saudara kandung yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
10. Kevin Valen Aditya yang selalu memberikan semangat, doa, masukan, penghiburan, materi, dan menemani penulis dari awal masa perkuliahan.
11. Cahaya Anggraini, Siti Sulistya Famelia, Caroline Lydia Aulia, Intan Maharani Safitri, Karina Gracia Agatha yang telah memberikan semangat, motivasi, dan penghiburan kepada penulis.
12. Ellenia Difa Irgiarinda, Annisa Putri Nabila, Putri Wahyuni, A. Nizam Syahiib, Genta Duta Ramadhan, Khoironi Anwar, Ahmad Rizaldi, dan Dendi Sanjaya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis saat pengambilan data.
13. Saudara seperjuangan angkatan 2018 (CORSYL).
14. Keluarga besar Himasyilva Universitas Lampung.
15. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas seluruh kebaikan dan ketulusan yang diberikan oleh para pihak kepada Penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022.

*A. Velda Reissa Valeska*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	3
C. Kerangka Pemikiran .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pulau Pahawang.....	5
B. Kelembagaan .....	8
C. Pulau Kecil.....	12
D. Persepsi Masyarakat .....	15
E. Mitos dan Kepercayaan Lokal .....	16
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	19
A. Waktu dan Tempat.....	19
B. Bahan dan Alat.....	19
C. Pengumpulan Data.....	19
D. Analisis Data.....	24
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Sejarah Wilayah Hutan yang Dilindungi oleh Masyarakat di Pulau Pahawang.....	26
B. Kelembagaan dalam Menjaga Wilayah Hutan yang Dilindungi oleh Masyarakat di Pulau Pahawang.....	29
C. Folklor yang Mendukung Kesepakatan dalam Menjaga Wilayah Hutan yang Dilindungi oleh Masyarakat Di Pulau Pahawang. ....	36
D. Persepsi Masyarakat Terhadap Wilayah Hutan yang Dilindungi oleh Masyarakat di Pulau Pahawang.....	39
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	48
A. Simpulan.....	48

	Halaman
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50
<b>LAMPIRAN</b> .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel responden .....	23
2. Skala penilaian kuesioner persepsi masyarakat .....	23
3. Persepsi masyarakat terhadap hutan di Puncak Keramat.....	41
4. Persentase variable hasil perhitungan skala likert.....	88
5. Rekapitulasi persentase variable hasil perhitungan skala likert .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran .....	4
2. Peta perubahan tutupan lahan Pulau Pahawang tahun 2006, 2014, dan 2019 .....	7
3. Peta lokasi penelitian.....	20
4. Tahapan pengambilan data.....	21
5. Tahapan analisis kualitatif.....	25
6. Gunung Keramat .....	26
7. Makam Tubagus Mustofa di Puncak Keramat.....	27
8. Perjalanan menuju Puncak Keramat .....	30
9. Proses wawancara dengan Bapak Isnen.....	31
10. Belukar perbatasan wilayah kebun warga dan Puncak Keramat .....	31
11. Pohon tumbang bertuliskan “Selamat Datang” .....	32
12. Wawancara dengan Bapak Selamat .....	33
13. Wawancara dan turun lapang bersama Bapak Barmawi.....	34
14. Vegetasi di Puncak Keramat .....	35
15. Wawancara dengan Bapak Syahril.....	38
16. Karakteristik responden dalam hal jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.....	39
17. Salah satu pemandu wisata di Pulau Pahawang .....	41
18. Penilaian keberadaan Puncak Keramat .....	42
19. Pemukiman warga di bawah kaki Gunung Keramat.....	43
20. Penilaian kelembagaan di Puncak Keramat .....	44
21. Penilaian potensi wisata .....	45



Gambar	Halaman
22. Track menuju Puncak Keramat.....	46
23. Pemandangan dari atas Puncak Keramat .....	47
24. Kebun cengkeh milik juru kunci.....	90
25. Tutupan vegetasi hutan di Puncak Keramat.....	90
26. Hewan ternak warga di kaki Gunung Keramat.....	91
27. Kebun warga di kaki Gunung Keramat.....	91
28. Kantor desa.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner penelitian.....	61
2. Panduan pertanyaan .....	64
3. Transkrip dan koding data.....	66
4. Kategorisasi data .....	87
5. Kesimpulan sementara .....	88
6. Hasil persentase skala likert.....	88
7. Rekapitulasi persentase skala likert .....	89
8. Dokumentasi .....	90

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya (Direktorat Jenderal Pesisir dan PPK, 2004). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2008, pulau-pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya. Inounu *et al.* (2007) berpendapat, karakteristik yang dimiliki pulau-pulau kecil diantaranya secara ekologis terpisah dari pulau induknya, memiliki batas fisik yang jelas dan mempunyai keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Sumber daya alam yang dimiliki pulau kecil tergolong terbatas sehingga membutuhkan perhatian yang lebih mendalam dalam pengelolaannya. Seperangkat kebijakan dan prosedur transformatif skala nasional dan lokal yang memastikan mekanisme peraturan yang ketat dan distribusi manfaat yang adil diperlukan dalam mempertahankan penggunaan sumber daya alam di pulau kecil (Sangha *et al.*, 2019).

Sumber daya alam di pulau-pulau kecil saat ini terancam keberadaannya (Masterson *et al.*, 2013; Marganingrum, 2018). Pulau-pulau kecil mempunyai karakteristik sangat rentan terhadap aktivitas ekonomi, terbatasnya daya dukung sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Pengembangan dan pembangunan pulau kecil dan sangat kecil seringkali terkendala akan keterbatasan ketersediaan sumber daya alam (Sumawidjaja *et al.*, 2005). Pengembangan dan pembangunan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan memperhatikan aspek permasalahan dan potensi sumber daya alam yang ada pada setiap pulau (Cahyadi *et al.*, 2013).

Eksplorasi yang berlebihan di daerah pesisir dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap ketersediaan sumber daya alamnya. Konversi kawasan hijau di daerah pesisir menjadi sarana infrastruktur dan perumahan penduduk merupakan salah satu contoh contoh eksploitasi yang umum terjadi. Selain telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan di pulau-pulau kecil, kegiatan tersebut juga berdampak buruk terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir (Damayanti *et al.*, 2020). Salah satu sumber daya alam yang harus diperhatikan pengelolaannya di pulau-pulau kecil adalah sumber daya hutannya.

Menurut Mamuko *et al.* (2016), dari segi aspek sosial ekonomi, persepsi dan perilaku masyarakat merupakan faktor yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan hutan. Hal ini karena terdapat ketergantungan antara masyarakat lokal dengan sumber daya hutan sehingga menciptakan hubungan atau interaksi yang erat dengan hutan (Kristin *et al.*, 2018). Masyarakat lokal maupun masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dalam melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka, pengetahuan asli yang dimiliki bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Mereka juga memiliki hukum adat untuk ditegakkan serta mempunyai kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

Seperti halnya pada masyarakat di Kepulauan Maluku yang memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang disebut dengan Sasi. Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat (Ummanah, 2013). Masyarakat adat Tugutil di Dusun Tukur-tukur, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola hutan yaitu terdapat larangan merusak Kawasan Sagu Raja, Buko, Nonaku, dan Ma Ngadodo Gomu Pahiyara atau batas pemeliharaan (Niapele, 2014). Selain itu Menurut Salampessy *et al.* (2015), di wilayah pesisir Kota Ambon terdapat pengetahuan ekologi tradisional masyarakat dan peran lembaga lokal mampu mempengaruhi

masyarakat dalam beradaptasi terhadap lingkungannya sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

Salah satu sumber daya alam di pulau kecil adalah wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang. Pulau ini memiliki luas 1.084 Ha sehingga tergolong ke dalam pulau kecil. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang?
2. Bagaimana kelembagaan dalam menjaga wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang?
3. Bagaimana folklor yang mendukung kesepakatan dalam menjaga wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang?

## **B. Tujuan**

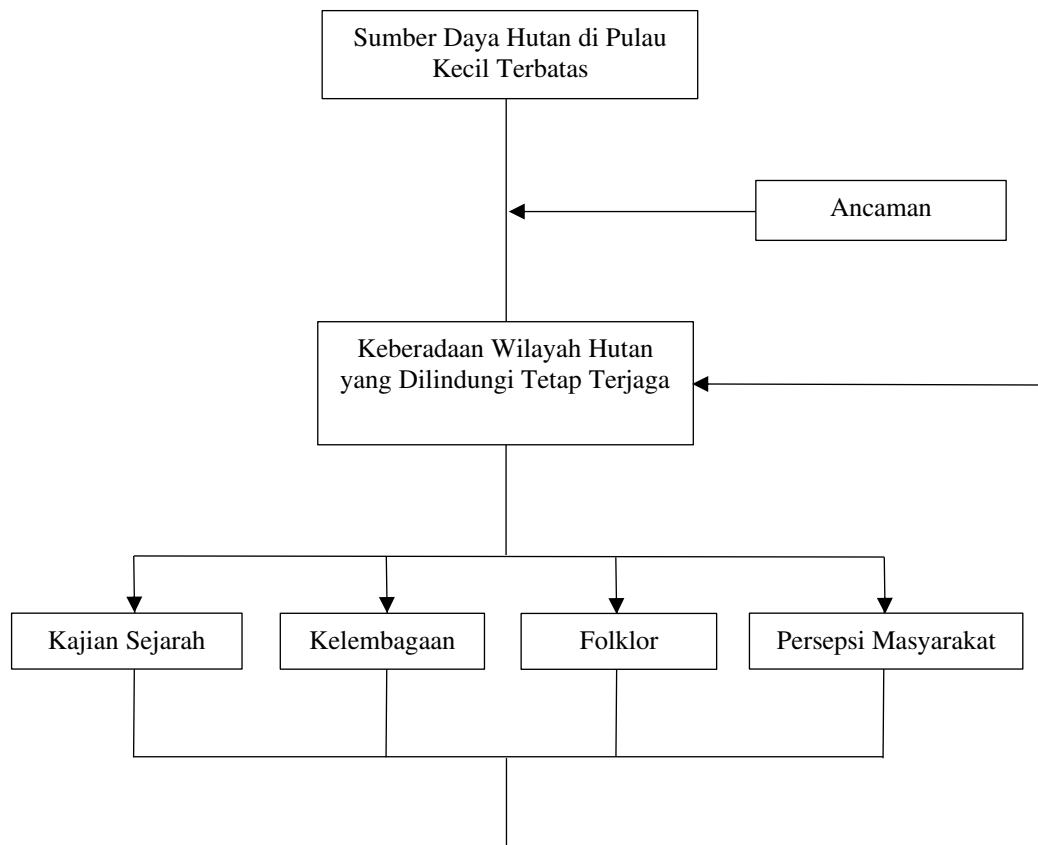
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sejarah wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang.
2. Mendapatkan informasi kelembagaan dalam menjaga wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang.
3. Mengetahui folklor yang mendukung kelembagaan dalam menjaga wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang.
4. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap wilayah hutan yang dilindungi oleh masyarakat di Pulau Pahawang.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam yang khas namun tergolong terbatas. Potensi yang khas yang dimiliki pulau kecil juga dihadapkan oleh ancaman yang tinggi, sehingga diperlukan perhatian lebih lanjut dalam pengelolaannya. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah wilayah hutan yang disepakati untuk dilindungi secara bersama oleh masyarakat dimana hutan tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Wilayah ini

memiliki fungsi sebagai pencegah longsor, penyimpan cadangan air, menjaga kestabilan ekosistem serta terdapat makam keramat di tengah wilayah hutan, sehingga hutan ini dilindungi oleh masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji mengenai sejarah dilindunginya hutan tersebut, kelembagaan, folklor serta persepsi masyarakat dalam menjaga keberadaan wilayah hutan di pulau kecil. Kerangka penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pulau Pahawang

Pulau Pahawang terbagi menjadi beberapa dusun, di antaranya: Dusun Suak Buah, Dusun Jelarangan, Dusun Kalangan, Dusun Cukuh Nyai, dan Dusun Pahawang dengan jumlah penduduk total 1.679 jiwa (Mardani *et al.*, 2017). Pulau ini berlokasi dekat dengan Teluk Punduh Pidada yang secara spesifik terletak di  $5^{\circ}41'53''-5^{\circ}39'02''$  LS dan  $105^{\circ}11'44''-105^{\circ}14'59''$  BT (Anggara *et al.*, 2020). Jarak dari pulau ke pusat kecamatan adalah sejauh 10 km atau sekitar 2 jam dalam waktu perjalanan, dan jarak Pulau Pahawang ke pusat kota adalah sejauh 45 km atau sekitar 4 jam dalam waktu perjalanan (Alfatikha *et al.*, 2020). Pulau tersebut terletak pada ketinggian 10-131 m dari permukaan laut mempunyai topografi yang landai dan berbukit (Mardani *et al.*, 2017). Pulau ini memiliki jenis tanah seperti regosol dan aluvial, jenis tanah ini sering dikenal sebagai tanah pasir, karena lebih dari 60% komposisinya terdiri dari pasir dan teksturnya sangat kasar (BPS Kabupaten Pesawaran, 2013). Wilayah ini memiliki suhu udara rata-rata  $28,5^{\circ}$ - $32^{\circ}$  C dengan curah hujan rata-rata 185,2 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 12,1 hari/bulan (Febryano *et al.*, 2014), dan memiliki keberagaman suku di dalamnya.

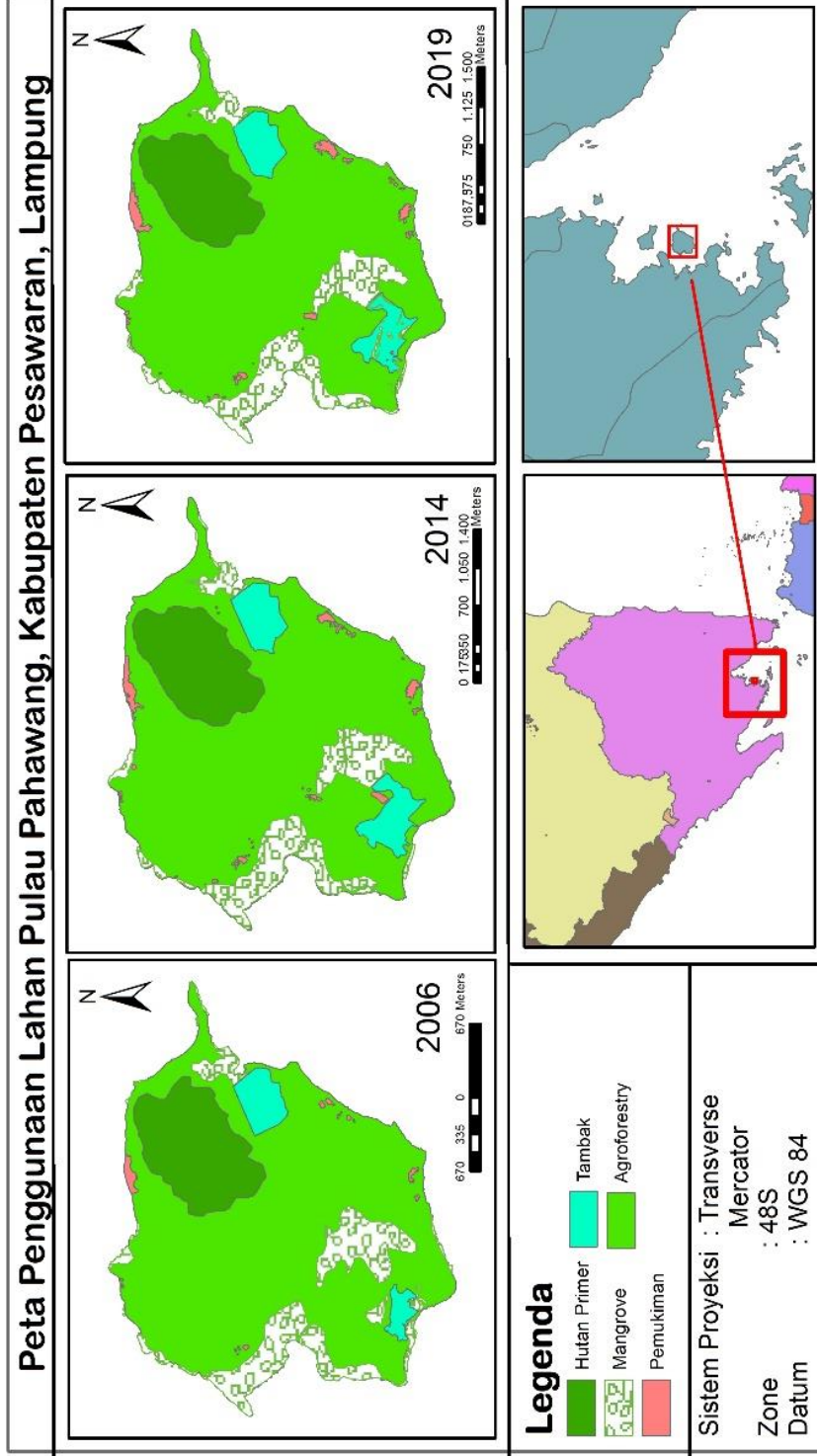
Suku yang ada di Pulau Pahawang saat ini banyak dihuni oleh penduduk keturunan suku Lampung, Jawa Serang, Bugis dan Padang. Kehidupan penduduknya sebagian besar berusaha sebagai petani, buruh, pekebun dan nelayan (Davinsky *et al.*, 2015). Mata pencaharian ini dilakukan oleh penduduk secara bergantian melihat kondisi usaha yang dilakukan. Bagi penduduk yang menjadikan sektor pertanian untuk sampingan biasanya penduduk hanya bertani pada saat musim-musim wisatawan sedang berkurang, dan kembali beralih menjadi penyedia jasa wisatawan pada saat musim-musim liburan sehingga

jumlah wisatawan pun meningkat (Muliarto *et al.*, 2019). Wisatawan yang datang biasanya menikmati keindahan alam di pulau tersebut, yang mana keindahan alam tersebut seperti tutupan lahan. Pulau ini memiliki jenis tutupan lahan yang beragam.

Tutupan lahan yang ada di Pulau Pahawang meliputi pemukiman, agroforestri, hutan mangrove, hutan marga dan tambak (Wahyuni *et al.*, 2020). Luas tutupan lahan agroforestri sebesar 830,86 ha, dengan komposisi tanaman antara lain kakao, kelapa, cengkeh, durian, rambutan, dukuh, sukun, petai, mangga, pinang, jengkol dan aren. Luas hutan mangrove sebesar 141,94 ha. Hutan marga berlokasi di perbukitan yang sekaligus berfungsi sebagai *buffer zone* di Pulau Pahawang. Hutan mangrove dan lahan agroforestri letaknya tidak berjauhan dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak (Wahyuni *et al.*, 2020). Selain itu keindahan pulau kecil juga menjadi satu komposisi ekosistem yang utuh dan alami. Pulau tersebut memiliki sumber daya pantai dan laut yang beragam dan produktif sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Peta perubahan tutupan lahan disajikan pada Gambar 2.

Obyek wisata yang terkenal dan banyak menarik wisatawan yaitu wisata pantai, mangrove dan terumbu karang (Mustika *et al.*, 2017). Wisata pantai dapat diartikan sebagai wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai beserta komponennya (Yulianda *et al.*, 2010). Jenis wisata yang ada selain itu *snorkeling* maupun *diving* (Mardani *et al.*, 2017). Objek wisata yang terkenal pada Pulau Pahawang salah satunya adalah terumbu karang. Ekosistem terumbu karang berada di bagian sebelah barat pulau yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dari Pulau Pahawang Besar. Kondisi terumbu karang hidup yang ada di sekitar Pulau Pahawang sangat bervariasi. Terumbu karang mulai banyak dijumpai pada bagian barat yang dekat dengan daratan Pulau Sumatera (Mardani *et al.*, 2017). Perkembangan pariwisata di pulau ini berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengembangan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Febryano *et al.*, 2017).





Sumber: Afifah (2021).

Gambar 2. Peta perubahan tutupan lahan Pulau Pahawang tahun 2006, 2014, dan 2019.

Fokus pengembangan wisata berkelanjutan ditujukan untuk konservasi, terutama konservasi mangrove dan terumbu karang (Wahyuni, *et al.*, 2020). Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung (2014) mengatakan bahwa wisatawan pada tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatan. Selain pariwisata, Pulau Pahawang memiliki sumber daya pantai dan laut yang beragam dan produktif sehingga dapat dijadikan sebagai objek ekowisata (Mardani *et al.*, 2017).

Adanya ekowisata tersebut membuat wisatawan tidak hanya melakukan wisata, tetapi juga diminta untuk berpartisipasi dalam pelestarian alam, di mana setiap wisatawan diwajibkan untuk menanam mangrove. Selain menikmati keanekaragaman hayati mangrove, aktivitas lainnya adalah berenang, menyelam, memancing di hampir seluruh pesisir Pulau Pahawang yang merupakan bagian dari ekosistem mangrove dan pesisir di wilayah tersebut (Febryano, 2014). Pulau tersebut memiliki hutan primer di dalamnya yang dilestarikan oleh masyarakat.

Hutan primer di Pulau Pahawang difungsikan sebagai pasokan sumber air bersih utama, dan pada tahun 2013 dilancarkan rencana PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Program ini adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mengakses pelayanan air minum dan sanitasi dalam capaian penerapan perilaku hidup bersih sehat di wilayah pedesaan hingga pinggiran kota (Fitriyani dan Rahdriawan, 2015). Akan tetapi program ini terkendala birokrasi dari pemerintah daerah. Saat ini, upaya masyarakat dalam mengakses sumber air bersih hanya sumur bor sederhana yang digali dalam dengan diameter yang besar dan dialirkan ke rumah-rumah warga. Tidak ada jaminan bahwa hutan primer akan konstan luasannya (Afifah *et al.*, 2021).

## **B. Kelembagaan**

Kelembagaan memiliki arti perangkat lunak, aturan main, rasa percaya, keteladanan dan konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari *et al.*, 2013). Kelembagaan tidak hanya sebatas hubungan kerja didalam dan antar lembaga (Sukwika, 2018). Kartodihardjo (2006) menekankan bahwa kelembagaan juga dapat menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, rasa percaya, tindakan bersama, serta pengaruh hak-hak terhadap kearifan dalam

pengelolaannya. Kelembagaan memiliki bahan acuan yang memberikan tata cara, kepastian, dan pedoman pelaksanaan tindakan tertentu. Memprioritaskan keselarasan kelembagaan dengan tujuan, nilai, atau kebutuhan sosial (Syahyuti, 2003).

Kegiatan kelembagaan tidak hanya dilihat pengaruhnya dari segi internal kelembagaan saja, tetapi segi eksternal kelembagaan juga harus diperhatikan (Sari *et al.*, 2013). Kepengurusan dalam kelembagaan hutan desa dapat dinilai dari dua segi yaitu struktur organisasi lembaga pengelola dan kelengkapan administrasi pengelolaan hutan desa (Laksemi *et al.*, 2019). Pembangunan pedesaan dapat dikategorikan maju, salah satu syarat untuk melihatnya adalah dari aspek kelembagaannya (Hanafie, 2010). Hal ini selaras dengan pemaparan Febryano *et al.* (2015) yaitu kelembagaan lokal dapat membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Lembaga dan pemanfaatan sumber daya alam memiliki hubungan kuat.

Terdapat hubungan kuat yang ada antara lembaga dan pemanfaatan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam (Baland *et al.*, 1996; Ostrom, 1990). Istilah “lembaga” mengacu pada struktur, mekanisme dan proses serta aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dan tatanan sosial (North, 1991; Ostrom, 1990). Berdasarkan North (1991) sebuah institusi terdiri dari batasan-batasan informal dan aturan-aturan formal serta mekanisme penegakannya. Yami *et al.* (2009) dalam studinya menunjukkan perbandingan mendasar antara lembaga formal dan informal. Kedua institusi dengan perbedaan yang luar biasa diasumsikan dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada perilaku manusia menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan (Dash and Bahera, 2015). Pelestarian hutan juga turut melibatkan kelembagaan lokal didalamnya.

Kelembagaan lokal dapat melestarikan dan menjaga hutan melalui nilai, norma dan aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Norma atau nilai yang berlaku di masyarakat pada dasarnya dibuat dan dilaksanakan secara turun-temurun. Schmid (2004) mendefinisikan bahwa struktur adalah suatu alternatif-alternatif kelembagaan di mana para pemangku kepentingan dapat memilih untuk menyusun berbagai hal dalam sebuah sistem tertentu. Struktur yang dimaksud menggambarkan aturan-aturan, norma-norma atau nilai hidup yang berlaku dan

budaya yang berlaku di masyarakat lokal (Aminah *et al.*, 2017). Hal ini dapat dilihat pada kelembagaan lokal dalam pengelolaan mangrove di Pulau Pahawang.

Kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam pengelolaan mangrove, ketika masyarakat mengambil peran aktif dalam menerapkan aturan-aturan di bawah pengelolaan organisasi lokal. Keberlanjutan kelembagaan lokal pengembangan pengelolaan mangrove di Pulau Pahawang sangat terkait dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kedudukan kelembagaan lokal mulai tumbuh kuat dan melembaga sejak ditetapkannya Tingginya kepercayaan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap konservasi mangrove terlihat dari dukungan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap aturan-aturan yang disepakati dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove (Febryano *et al.*, 2014). Kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan.

Penguatan kelembagaan lokal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan. Uphoff (1994) menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas di tingkat lokal mencakup pembentukan dan penguatan institusi lokal. Penguatan kelembagaan lokal menjadi sangat penting karena kelembagaan lokal tidak memperoleh status maupun kualitas kelembagaan sebagai hasil dari pencapaian dan penghargaan dari masyarakat. Sebagian besar lembaga lokal lebih dipandang sebagai organisasi daripada lembaga. Penguatan organisasi, bagaimanapun, harus difokuskan pada peran dan proses pengambilan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi, serta resolusi konflik. Ketika fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara efektif, organisasi akan membangun dukungan, loyalitas dan komitmen, memungkinkan organisasi berfungsi lebih efektif sehingga akan meningkatkan status kelembagaannya (Febryano *et al.*, 2014). Uphoff (1986) memperhatikan kategori organisasi yang berbentuk institusi atau sebaliknya. Kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat yang mengiringinya merupakan sesuatu yang layak mendapat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan (Uphoff, 1992).

Kelembagaan lokal yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui merupakan strategi memperkuat sumber penghidupan (Zenteno *et al.*, 2013; Ming'ate *et al.*, 2014; Steele *et al.*, 2015). Aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah masyarakat lokal (Agrawal dan

Gupta, 2005; Agrawal dan Ostrom, 1999). Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal (1) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Kelembagaan lokal juga dapat diterapkan di pulau-pulau kecil.

Pentingnya kelembagaan dan organisasi lokal dalam pembangunan pedesaan telah diakui secara luas dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di banyak negara (Fisher, 2004). Hal ini terjadi karena orang saling mengenal satu sama lain pada tingkat lokal, sehingga menciptakan peluang untuk melakukan tindakan kolektif dan saling menolong, serta memobilisasi dan mengelola sumber daya secara mandiri (Uphoff, 1986). Pengelolaan berbasis masyarakat dapat membuat praktik-praktik yang tidak lestari menjadi lebih lestari yang muncul melalui berbagai cara, seperti pengorganisasian secara swadaya, pengembangan kelembagaan, eksperimen, elaborasi pengetahuan, dan pembelajaran sosial (Marschke *et al.*, 2005). Inisiatif dan juga partisipasi masyarakat dapat menjadi penggerak dalam pengelolaan hutan.

Inisiatif dan partisipasi masyarakat dapat menggerakkan dan mengorganisir mereka untuk melakukan aksi kolektif dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan (Febryano *et al.*, 2014; Cesario *et al.*, 2015). Partisipasi masyarakat harus menjadi perhatian utama pengambil kebijakan, karena keberhasilan kelembagaan lokal dalam jangka panjang tidak dapat dipastikan tanpa adanya partisipasi tersebut. Kamoto *et al.* (2013) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang lemah dan tidak cukup mempertimbangkan kompleksitas kelembagaan lokal, serta pengaruh dari terbatasnya keterlibatan masyarakat dan kelembagaan lokal dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dapat menciptakan dan memperkuat praktek-praktek penggunaan sumber daya yang destruktif dan konflik sosial yang diwariskan secara kumulatif. Tole (2010) menyatakan bahwa kapasitas negara dan masyarakat yang lemah dapat diperkuat melalui dukungan eksternal agen non negara seperti LSM, lembaga pemberi pinjaman, dan organisasi amal, walaupun sebagian besar dukungan relatif

lingkupnya terbatas dan bersifat jangka pendek. Meskipun peran lembaga non negara memiliki lingkup terbatas dan bersifat jangka pendek, namun dapat memberikan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Pengelolaan hutan yang lestari memerlukan sebuah kelembagaan yang dapat mengatur hubungan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kelembagaan adat yang diberlakukan di sekitar hutan adat memiliki tujuan dan fungsi guna menjaga kelestarian hutan adat dan lingkungannya (Firdaus, 2017). Kelembagaan adat berperan dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, baik secara bersama ataupun perorangan (Oktoyoki *et al.*, 2016). Menurut Darusman (2012), masyarakat adat yang dianggap memiliki keterbatasan pengetahuan ternyata mampu mengelola sumber daya hutan secara lestari melalui kekuatan kelembagaan dalam kelompok masyarakat sehingga dapat mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Kelembagaan digolongkan sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan (Hamzah, *et al.*, 2015).

Menurut Jones *et al.* (2011), efektivitas kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya dan kemungkinan untuk mengembangkan kolaborasi yang kuat di dalam masyarakat Agiasos, Yunani terkait dengan kepercayaan yang tinggi terhadap kelembagaan lokal. Pfahl (2005) menjelaskan bahwa keberlanjutan kelembagaan mengacu pada kompetensi kelembagaan dalam mengkoordinasikan interaksi manusia dalam rangka memfasilitasi pengambilan keputusan dan melaksanakan kebijakan yang berkelanjutan. Kelembagaan dapat mendukung pengelolaan hutan secara lestari.

### **C. Pulau Kecil**

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Berdasarkan UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. 67/2002 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 100.000 jiwa.

Pulau kecil memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan.

Beberapa karakteristik pulau-pulau kecil yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yaitu:

- a. rentan terhadap pemanasan global yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sehingga luas daratan makin berkurang,
- b. mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang cukup luas, sehingga wilayah perairan merupakan daya dukung utama pembangunan wilayah,
- c. mempunyai sumber daya alam yang terbatas dan umumnya telah mengalami eksploitasi secara berlebihan,
- d. peka terhadap bencana alam seperti vulkanisme, gempa bumi dan tsunami,
- e. umumnya terisolasi dan jauh dari pasar utama,
- f. terbuka untuk sistem ekonomi skala kecil, namun sangat peka terhadap kejutan pasar dari luar dalam skala yang lebih besar,
- g. mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menyebar tidak merata dengan kepadatan tinggi,
- h. mempunyai infrastruktur yang terbatas, dan
- i. pendidikan dan keterampilan penduduknya terbatas serta kepercayaan terhadap hal-hal mistis cukup kuat (Sitaniapessy, 2002).

Selain itu pulau-pulau kecil memiliki keindahan yang harus dilestarikan, namun pemanfaatan ruang yang ada harus optimal karena luasan yang terbatas (Pigawati, 2005). Pulau-pulau kecil sangat terkenal dengan tingkat keanekaragaman hayati di dalamnya, tetapi biota yang ada di sana juga terancam karena kerentanannya (Maharaj *et al.*, 2018).

Kerentanan pulau kecil dapat diminimalkan dengan adanya pengembangan dan pengelolaan pelindung pantai (*sea wall*) seperti, terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove (Tahir *et al.*, 2009). Pulau-pulau kecil mulai terkena dampak dari perubahan iklim global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Keterbatasan pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil menjadi masalah

yang sulit diatasi jika hanya mengandalkan hasil alami dari pulau untuk kebutuhan yang ada (Samudra *et al.*, 2010). Kebutuhan yang diambil langsung juga tidak dapat diandalkan, sehingga masyarakat akan membuka lahan untuk dijadikan perkebunan ataupun peternakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan ini juga dapat memicu rusaknya lahan yang terjaga secara alami menjadi beberapa lahan terbangun seperti lahan hutan yang berubah menjadi kebun buah semusim. Selain itu, pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu penyelesaian masalah yang ada pada pulau-pulau kecil karena keunikan dan potensinya (Anggara, 2020).

Keunikan yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil menjadi daya tarik wisata untuk warga lokal dan mancanegara. Potensi yang dimiliki pulau-pulau kecil sangat besar, tetapi karena banyak investor yang masuk untuk mengembangkan wisata di sana. Pengembangan wisata bahari yang ada menyebabkan konversi lahan yang dilakukan oleh para investor maupun warga pulau yang diusung dengan objek pariwisata seperti, terumbu karang, padang lamun, berbagai bentang alam (*ocean landscape*) yang unik, serta hutan mangrove yang menarik perhatian wisatawan (Alvi *et al.*, 2018; Latupapua *et al.*, 2019; Desmania *et al.*, 2018).

Kehidupan di pulau kecil sangat bergantung dengan aset dan peluang sosial ekonomi tetapi sangat rentan terhadap perubahan iklim (Onat *et al.*, 2018). Kerentanan pulau-pulau kecil sangat besar, dan semakin tinggi tingkat kerentanan suatu pulau maka pulau tersebut sudah mengalami kerusakan (Tahir *et al.*, 2009). Penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan yang terjadi di pulau-pulau kecil akan mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim (Mwalusepo *et al.*, 2016). Antisipasi terhadap perubahan iklim yang ekstrim telah dilakukan oleh komunitas internasional dengan memberikan pendanaan untuk memenuhi tantangan perubahan iklim dan membuat pengembangan yang berkelanjutan (Michalena *et al.*, 2017).

Fenomena perubahan iklim ini sudah terlihat di pulau-pulau kecil di beberapa negara *Small Island Development State* (SIDS) di kawasan Pasifik (Scandurra, 2018). Kajian kerentanan di negara-negara anggota SIDS ini didorong oleh sebuah resolusi yang dikeluarkan pada tahun 1994 yang bertujuan



mengembangkan indeks kerentanan lingkungan dan indeks lainnya secara berkelanjutan untuk menggambarkan status dari negara-negara kepulauan, hal ini karena wilayah pesisir merupakan suatu sistem yang kompleks antara fisik manusia dengan komponen alam yang ada (Taramelli *et al.*, 2015).

#### **D. Persepsi Masyarakat**

Persepsi secara umum sering diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu objek, baik itu objek fisik maupun sosial. Menurut Pahlevi (2007), persepsi adalah suatu proses untuk membuat penilaian (*judgment*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan penginderaan seseorang. Proses persepsi pun terdiri dari suatu interaksi yang sulit berdasarkan kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran (Febryano dan Rusita, 2018). Sikap seseorang sangat menentukan perilaku dan tanggapan seseorang terhadap masalah kemasyarakatan serta masalah lingkungan. Sumber daya alam tidak dapat dilestarikan dan dikelola dengan baik tanpa terlebih dahulu mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap lingkungan (Lee and Zhang dalam Setiawan *et al.*, 2017). Mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap sumber daya alam akan sangat membantu untuk merancang strategi pengelolaan yang efektif, menjaga agar sumber daya alam tetap lestari dan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat (Setiawan *et al.*, 2017), salah satunya pada pengelolaan sumber daya hutan.

Persepsi masyarakat mengenai sumber daya hutan merupakan sebuah kemampuan untuk menganalisis dan membedakan gambaran tentang hutan sehingga akan berpengaruh terhadap pengetahuan, motivasi, sikap dan perilaku untuk melakukan sesuatu (Abdha, 2016). Pengelolaan sumber daya hutan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa terlebih dahulu mengetahui persepsi dan sikap masyarakat di sekitarnya. Menurut Sondakh *et al.* (2019) bahwa dengan mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat akan membantu dalam perencanaan strategi pengelolaan hutan yang efektif.

Partisipasi merupakan istilah deskriptif yang mencakup beragam kegiatan dan situasi yang melibatkan mental dan emosi seseorang untuk mendorong mencapai tujuan tertentu dan terdapat tanggung jawab di dalamnya (Hermawan *et al.*, 2016). Menurut Wardoyo (1992), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat

baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Keikutsertaan tersebut terbentuk sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat yang lain dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai (Siu, 2020).

Aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Siahaya *et al.*, 2016; Alfandi *et al.*, 2019). Dampak positif partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan kawasan hutan (Sinery *et al.*, 2016). Beberapa sifat dari partisipasi antara lain positif, kreatif, kritis, korektif konstruktif dan realistis. Partisipasi dikatakan positif, bila partisipasi tersebut mendukung kelancaran usaha bersama dalam mencapai tujuan. Partisipasi kreatif, berarti keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan melainkan memikirkan sesuatu yang baru baik gagasan, metode maupun cara baru yang lebih efektif dan efisien. Partisipasi dapat dikatakan kritis, korektif-konstruktif bila keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu jenis atau bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan bila ada dan memberikan alternatif yang lebih baik. Partisipasi yang realistis mempunyai arti bahwa keikutsertaan seseorang dengan memperhitungkan realitas atau kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun realitas mengenai kemampuannya, waktunya yang tersedia dan adanya kesempatan keterampilan (Gultom, 1985).

#### **E. Mitos dan Kepercayaan Lokal**

Mitos merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat (Kariarta, 2019). Mitos dalam pengertian lama identik dengan sejarah atau historis, yang dibentuk masyarakat pada masanya (Iswidayati, 2007). Fungsi utama mitos bagi kebudayaan primitif adalah mengungkapkan, mengangkat, dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi ritus, serta memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia. Selain itu, mitos juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu, di antaranya adalah a) proses penyadaran akan kekuatan gaib. Mitos bukanlah informasi

tentang kekuatan gaib, tetapi cara mengantisipasi, mempelajari, dan berelasi dengannya. b) Memberi garansi bagi kekinian. Mitos merepresentasikan berbagai peristiwa yang pernah ada, dan mengandung saran serta antisipasi bagi kekinian. c) Mitos merentangkan cakrawala epistemologis dan ontologis tentang realitas.

Mitos memberikan gambaran tentang dunia, tentang asal-mulanya, tetapi bukan seperti ilmu sejarah modern. Ruang dan waktu mitologis hanyalah konteks untuk berbicara tentang awal dan akhir, atau asal-muasal dan tujuan kehidupan, dan bukan ruang dan waktu faktual (Simon, 2006). Hal tersebut juga berdampak dalam kehidupan masyarakat tergantung bagaimana kondisi masyarakat di daerah asalnya. Apabila masyarakat di daerah tersebut mayoritas masih tradisional atau bersifat konservatif maka mitos akan cepat berkembang dan dipercaya oleh masyarakat, namun apabila sebagian besar masyarakat dalam daerah tersebut adalah masyarakat yang berfikiran modern maka akan sulit menerima apalagi mempercayai mitos-mitos tersebut. Sebuah mitos dibangun memiliki tujuan tertentu.

Mitos yang berkembang dalam lingkungan masyarakat ada yang diarahkan untuk tujuan-tujuan positif. Contohnya adalah mitos yang dapat digunakan untuk menjaga kearifan lokal. Awig-awig ini menyatakan bahwa segala jenis pohon yang tumbuh di hutan adat desa termasuk hutan setra ari-ari dilarang untuk ditebang kecuali untuk upacara agama dan telah mendapat ijin dari Jero Kebayan. Awig-awig ini secara tidak langsung juga menjamin kelestarian hutan di Desa Bayung Gede (Putri 2016). Selain itu di Desa Tenganan Peringsingan Kabupaten Bali, terdapat sebuah mitos yang berkembang di tengah masyarakatnya tentang keberadaan ular mistis yang dipercaya menjaga kawasan hutan Desa Tenganan Pegringsingan. Mitos tersebut dikenal sebagai Lelipi Selahan Bukit. Efek rasa takut akan mitos Lelipi Selahan Bukit apabila seseorang merusak kawasan hutan menghasilkan kebaikan bagi alam sekitarnya, kepercayaan tersebut nyatanya telah menghindari kawasan hutan Tenganan dari alih fungsi lahan (Aditya *et al.*, 2018).

Tapok gagah merupakan sebutan bagi masyarakat adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci yang dipercaya sebagai tempat larangan bagi masyarakat untuk beraktifitas atau menggarap lahan. Terdapat pula daerah lain

seperti “fila” yang dipercayai masyarakat merupakan daerah hunian Harimau, sehingga masyarakat tidak berani menggarap lahan di daerah tersebut. Adanya kepercayaan akan hal tersebut menunjukkan adanya bentuk kearifan lokal yang berkembang di daerah HATLK pada tahun 2004-2009 yang masih sangat dipercayai masyarakat. Mitos tersebut bisa mempertahankan kawasan hutan adat dari aktivitas penggarapan dan penebangan hutan (Novianti *et al.*, 2022).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

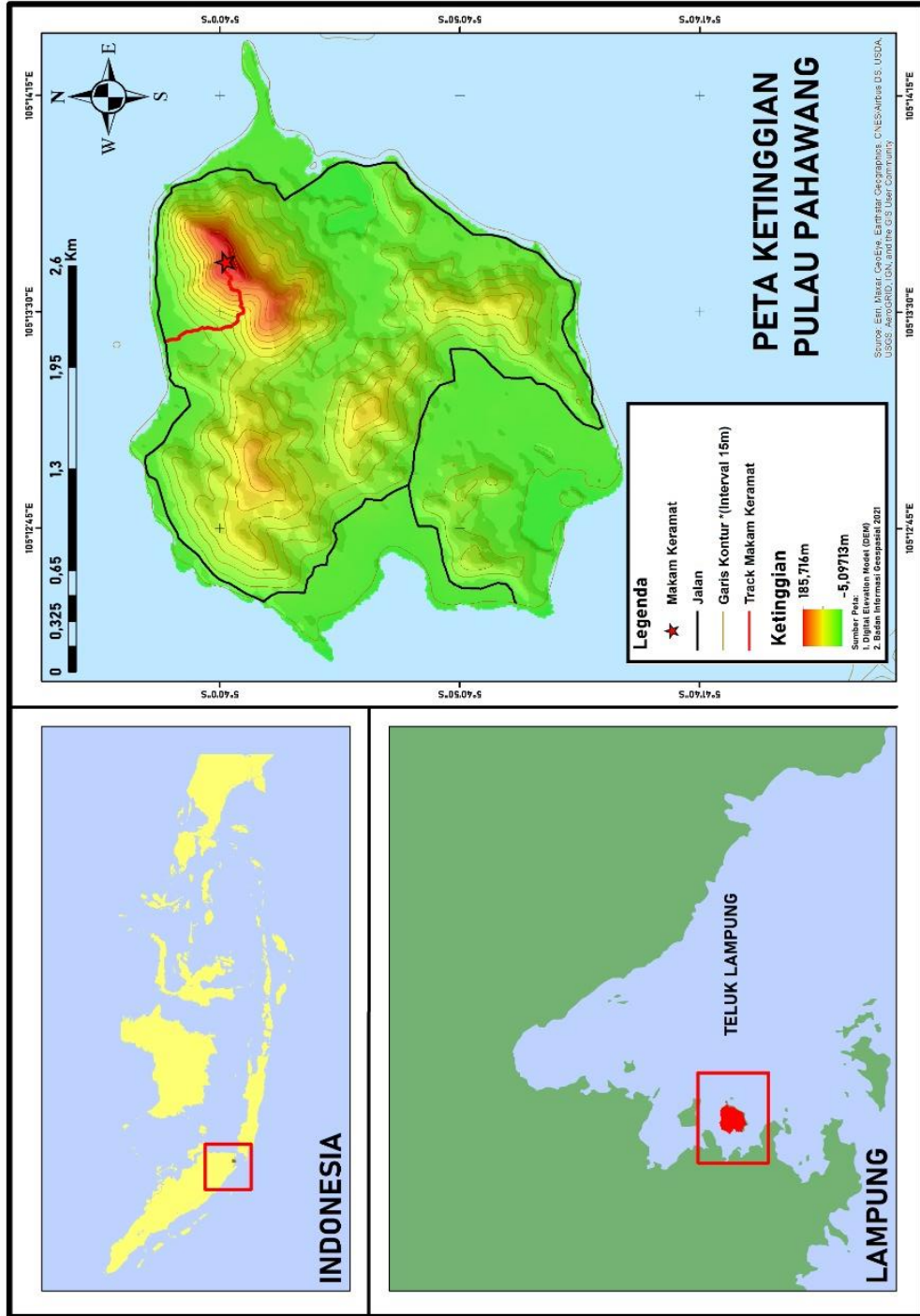
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November-Desember 2021 bertempat di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung (Gambar 2). Penelitian dilakukan di Pulau Pahawang di wilayah yang dilindungi oleh masyarakat ditandai dengan atribut bintang berwarna merah pada peta. Gambar 3 merupakan peta penggunaan lahan di Pulau Pahawang dari tahun 2006-2019. Warna hijau tua yang ada pada layout merupakan Gunung Keramat.

#### **B. Bahan dan Alat**

Objek penelitian pada penelitian ini ialah masyarakat sekitar hutan yang dilindungi di Desa Pulau Pahawang, alat yang digunakan yaitu alat tulis, laptop, perekam suara, dan kamera. Bahan yang digunakan adalah panduan wawancara dan kuesioner.

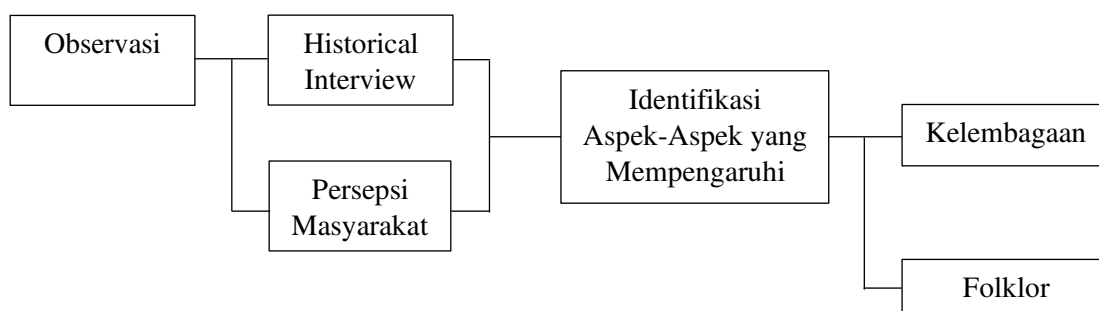
#### **C. Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Data sekunder data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer yang didapatkan dari sumber yang valid. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan *mixed methods*. *Mixed Method* merupakan metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yakni dengan memberikan interpretasi



Gambar 3. Peta lokasi penelitian.

terhadap hasil perhitungan kuantitatif (Creswell, 2017). Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kedua. Langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu (Gambar 4):



Gambar 4. Tahapan pengambilan data.

#### 1. Observasi

Observasi lapang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memverifikasi data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan.

#### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan hutan sehingga didapatkan fakta tentang objek yang diteliti, hal tersebut sesuai dengan pendapat Yin (2015) bahwa peneliti harus memiliki kemampuan untuk menyadari realitas sudut pandang “orang dalam” pada saat melakukan wawancara agar diperoleh data yang real. Responden dalam penelitian adalah informan kunci yang terdiri dari Bapak Selamat sebagai Kepala Desa, Bapak Isnen dan Bapak Syahril sebagai tokoh masyarakat, dan Bapak Barmawi sebagai Juru Kunci. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif.

#### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan panduan kuesioner untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai indikator persepsi masyarakat terhadap hutan yang dilindungi. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat. Sampel responden dipilih dengan teknik *random sampling*

karena dalam pengambilan sampelnya semua subjek dalam populasi dianggap sama. Desa Pulau Pahawang dibagi menjadi enam dusun yaitu: Suak Buah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, Cukuh Nyai, dan Pahawang (Anggara *et al.*, 2020). Perhitungan jumlah sampel responden menggunakan rumus

Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{412}{1+412(0,01)}$$

$$n = 80,46 \sim 81 \text{ responden}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah kepala keluarga (KK)

$e$  = Batas toleransi kesalahan = 10%

$N$  total =  $78+74+77+105+78 = 412$ . Kemudian dimasukkan ke dalam rumus

slovin  $n = \frac{412}{1+412(0,01)} = 80,46 \sim 81$  responden total. Selanjutnya untuk

mencari masing-masing dusun menggunakan *proporsional* dengan rumus:

$$N = \frac{n}{S} \times n$$

Keterangan:

$N$  = Jumlah sampel tiap dusun

$n$  = Jumlah populasi

$S$  = Jumlah total populasi

$$\text{Suak Buah} = \left(\frac{78}{412}\right)81 = 15,33 \sim 15$$

$$\text{Penggetahan} = \left(\frac{74}{412}\right)81 = 14,54 \sim 15$$

$$\text{Jeralangan} = \left(\frac{77}{412}\right)81 = 15,13 \sim 15$$

$$\text{Cukuh Nyai} = \left(\frac{105}{412}\right)81 = 20,64 \sim 21$$

$$\text{Pahawang} = \left(\frac{78}{412}\right)81 = 15,33 \sim 15$$

Total sampel = 81



Tabel 1. Sampel Responden

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Responden (KK)
1.	Suak Buah	78	15
2.	Penggetahan	74	15
3.	Jelারণan	77	15
4.	Cukuh Nyai	105	21
5.	Pahawang	78	15
Total		412	81

Setelah menghitung jumlah responden selanjutnya diukur menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018) dalam penelitian ini Skala Likert digunakan untuk mengukur hasil wawancara terkait persepsi masyarakat terhadap hutan yang dilindungi oleh masyarakat di pulau kecil terkait dengan keberadaan hutan, kelembagaan, dan potensi wisata dengan kriteria penilaian seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala Penilaian Kuesioner Persepsi Masyarakat

Kriteria	Penilaian
Baik	3
Cukup	2
Tidak Baik	1

Jawaban yang diperoleh dari Skala Likert selanjutnya dianalisis dengan menghitung skor setiap jawaban dari responden (Sugiyono, 2018).

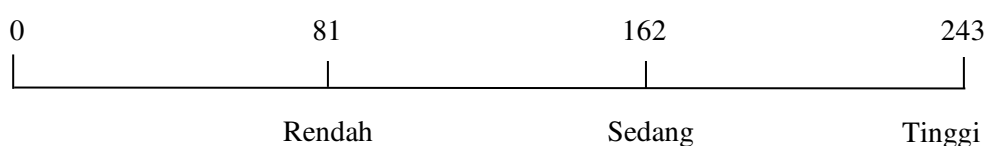
Perhitungan skor dengan cara:

Skor= Jumlah responden yang menjawab x bobot

Interval kelas dihitung dengan cara:

Jumlah skor tertinggi =  $3 \times 81 = 243$

Jumlah skor rendah =  $1 \times 81 = 81$



Selain menghitung skor, juga dihitung persentase kelompok responden (Riduwan, 2007) dengan cara:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah responden}}{\text{Jumlah total responden}} \times 100\%$$

#### 4. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data berupa dokumen secara tidak langsung melalui berbagai media informasi baik *online* (media sosial, website, jurnal) maupun *offline* (media cetak, peraturan perundang-undangan, buku, dan kebijakan). Serta pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi penelitian.

### D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Analisis Deskriptif

Data persepsi masyarakat yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penyajian data dapat disajikan melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, standar deviasi, dan persentase (Sugiyono, 2018).

#### 2. Analisis Kualitatif

Data sejarah, kelembagaan, dan folklor yang didapat kemudian dianalisis dengan cara kualitatif. Tahapan yang dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Irawan (2007) sebagai berikut:

##### 1. Pengumpulan data mentah

Pengumpulan data mentah yaitu pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan kepada empat informan kunci yang telah disebutkan di atas.

##### 2. Transkrip data

Pada tahap ini hasil wawancara dengan informan yang telah direkam kemudian diubah ke dalam bentuk tulisan.

### 3. Pembuatan koding.

Pembuatan koding diawali dengan membaca ulang seluruh data yang telah di transkrip, selanjutnya akan terdapat bagian-bagian tertentu dari transkrip. Apabila ditemukan hal-hal penting lalu diambil kata kuncinya. Kata kunci ini kemudian akan diberikan kode. Kata kunci yang digunakan adalah (1) mengenai aturan main, (2) mengenai sanksi, dan (3) mengenai kepatuhan.

### 4. Kategorisasi data

Menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

### 5. Penyimpulan sementara

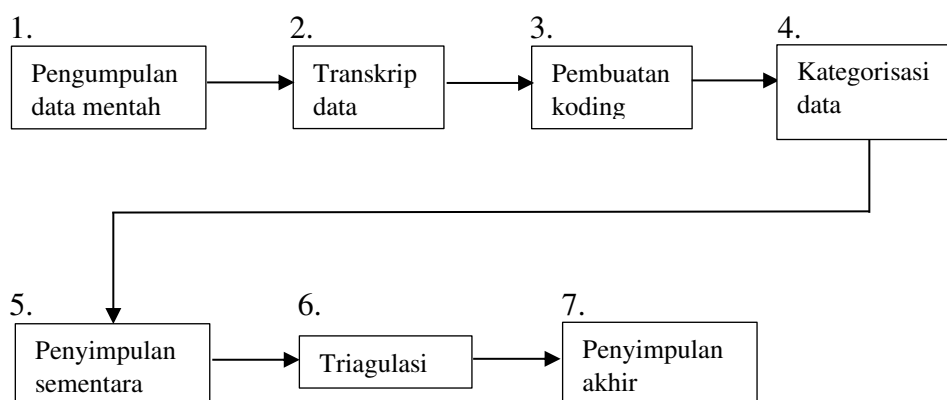
Proses yang penyimpulan sementara adalah mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan yang diambil berdasarkan dengan data sebenarnya.

### 6. Triangulasi

Proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya dalam hal ini adalah antara informan kunci yang satu dengan yang lainnya.

### 7. Penyimpulan akhir

Penyimpulan akhir merupakan ujung dari suatu proses penelitian. Penyimpulan akhir diambil pada saat data yang diambil sudah sampai pada tahap jenuh (*saturated*).



Gambar 5. Tahapan analisis kualitatif

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Wilayah Puncak Keramat dilindungi oleh masyarakat Pulau Pahawang dilatarbelakangi oleh peristiwa longsor pada zaman dahulu, peristiwa ini tidak memakan korban karena pada saat itu jumlah penduduk di pulau tersebut masih sedikit. Masyarakat menyadari wilayah tersebut penting untuk dilindungi karena memberikan manfaat ekologi kepada masyarakat. Selain itu di sana juga terdapat sebuah makam yang sering dijadikan tempat berziarah oleh masyarakat maupun wisatawan.

Aturan informal yang mengatur pengelolaan hutan di Puncak Keramat antara masyarakat dan pemerintah desa untuk melindungi wilayah tersebut berupa kesepakatan. Kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 1977 yang diteruskan secara turun-temurun di masyarakat sampai saat ini. Batas wilayahnya ditandai dengan kebun warga sebagai batas wilayahnya. Sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melanggar kesepakatan adalah sanksi sosial seperti menanam pohon yang jumlahnya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sampai saat ini masyarakat Pulau Pahawang bersikap patuh terhadap kesepakatan tersebut dan belum pernah ada yang melanggarnya.

Kesepakatan tersebut juga didukung oleh kepercayaan-kepercayaan masyarakat terkait hukuman yang akan diterima apabila melanggar. Hukuman yang diterima dapat berupa terjatuh dari puncak, pingsan, kesurupan, tertabrak mobil dan parahnya sampai meninggal dunia.

95,06% masyarakat sudah mengetahui akan keberadaan Puncak Keramat serta pentingnya wilayah tersebut untuk dilindungi. Kelembagaan juga dipersepsikan tinggi oleh masyarakat (87,04%). Sebagian besar masyarakat (74,07%) juga memberikan respon yang positif apabila Puncak Keramat dijadikan

sebagai wisata religi namun, diperlukan perencanaan wisata dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lanjut.

## **B. Saran**

Memperkuat kelembagaan seperti mempertegas sanksi agar keberadaannya tetap terus bertahan. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai wisata religi untuk menambah destinasi wisata yang ada di Pulau Pahawang dengan harapan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Hal tersebut juga harus diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut terkait kepercayaan yang berkembang di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdha, F.M. 2016. *Persepsi Masyarakat terhadap Hutan Mangrove di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur*. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Aditya, I.K.A.B., Arsana, I.G.K.G., Suarsana, I.N. 2018. Nilai kearifan ekologis dalam mitos Lelipi Selahan Bukit bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana*. 22(1): 81-86.
- Afifah, F.A.N., Febryano, I.G., Santoso, T., Darmawan, A. 2021. Identifikasi perubahan penggunaan lahan agroforestri di Pulau Pahawang. *Journal of Tropical Marine Science*. 4(1): 1-8.
- Agrawal, A., Gupta, K. 2005. Decentralization and participation: The governance of common pool resources in Nepal's Terai. *World development*. 33(7): 1101-1114.
- Agrawal, A., Ostrom, E. 1999. Collective action, property rights, and devolution of forest and protected area management. *Proceedings of the International Conference 1999 in Puetro Azul*. 21-25.
- Alfandi, D., Qurniati, R., Febryano, I.G. 2019. Partisipasi masyarakat dan pengelolaan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 30-42.
- Alfatikha, M., Herwanti, S., Febryano, I.G., Yuwono, S.B. 2020. Identifikasi jenis tanaman agroforestri untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Desa Pulau Pahawang. *Gorontalo Journal of Forestry Research*. 3(2): 55-63.
- Alvi, N.N., Nurhasanah, I.S., Persada, C. 2018. Evaluasi keberlanjutan wisata bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Plano Madani*. 7(1): 59-68.
- Aminah, L.N., Safe'i, R., Febryano, I.G. 2017. Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani (gapoktan) di kesatuan pengelolaan hutan lindung Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Journal of Sylva Indosiana*. 1(1): 29-35.

- Anggara, G.D., Febryano, I.G., Santoso, T., Darmawan, A. 2020. Faktor–faktor perubahan lahan mangrove di Pulau Pahawang. *Prosiding Seminar Nasional Konservasi*. 66-71.
- Anggara, G.D. 2020. *Identifikasi Perubahan Lahan Mangrove di Pulau Pahawang Menggunakan Penginderaan Jauh*. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Baland, J.M., Platteau, J.P. 1996. *Halting Degradation of Natural Resources: Is There a Role for Rural Communities?* Book. Food & Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 432p.
- Buli, W., Bakri, S., Febryano, I.G. 2018. Kelembagaan pertambangan batubara di hutan rakyat. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 81-90.
- Cahyadi, A. 2012. Permasalahan sumber daya air pulau kecil. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 1-8.
- Cesario, A.E., Yuwono, S.B., Qurniati, R. 2015. Partisipasi kelompok masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 21-30.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Buku. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Darusman, D. 2012. *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*. Buku. IPB Press. Bogor.
- Dash, M., Behera, B. 2015. Local institutions, collective action and forest conservation: the case of Similipal Tiger Reserve in India. *Journal of Forest Economics*. 21(4): 167-184.
- Davinsky, R., Kustanti, A., Hilmanto, R. 2015. Kajian pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(3): 95-106.
- Desmania, D., Harianto, S.P., Herwanti, S. Partisipasi kelompok wanita cinta bahari dalam upaya konservasi hutan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 28-35.
- Febryano, I.G., dan Rusita, R. 2018. Persepsi wisatawan dalam pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 8(3): 376-382.

- Febryano, I.G., Sinurat, J. Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive shrimp pond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 55: 012042.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 69-76.
- Febryano, I.G. 2014. *Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. (Disertasi). Institut Pertanian Bogor. Bogor. 131p.
- Firdaus. 2017. Peran lembaga adat Kenagarian Rumbio dalam pelestarian hutan larangan adat (Studi: hutan larangan adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). *JOM FISIP*. 4(1): 1-13.
- Fisher RJ. 2004. What makes effective local organizations and institutions in natural resource management and rural development. *Proceedings Seminar on Role of Local Communities and Institutions in Integrated Rural Development*. 85-96.
- Fitriyani, N., Rahdriawan, M. 2015. Evaluasi pemanfaatan air bersih program pamsimas di Kecamatan Tembalang. *Jurnal Pengembangan Kota*. 3(2):80-89.
- Gultom. 1985. *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*. Buku. UKSW. Salatiga.
- Hamzah, H., Suharjito, D., Istomo, I. 2015. Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 2(2):117-128.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Buku. Andi. Yogyakarta.
- Hanan. 2010. *Kajian Strategi Pengelolaan Sumber Daya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi*. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hermawan, Y., Suryono, Y. 2016. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 3(1): 97-108.



- Hasrawaty, E., Anas, P., Wisudo, S.H. 2017. Peran kearifan lokal Suku Bajo dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 11(1):25-34.
- Ichsan, Y., Hanafiah, Y. 2020. Mistisisme dan transendensi sosio-kultural Islam di masyarakat pesisir Pantai Parangkusumo Yogyakarta. *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. 5(1): 21-36.
- Inounu, I., Martindah, E., Saptati, R.A., Priyanti, A. 2007. Potensi ekosistem pulau-pulau kecil dan terluar untuk pengembangan usaha sapi potong. *Jurnal Wartazoa*. 7(4): 156-164.
- Irawan, P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Buku. DIA FISIP UI. Depok.
- Jones, N., Gleridou, C., Dimitrakopoulos, P.G, Evangelinos, K.I. 2011. Investigating social acceptability for public forest management policies as a function of social factors. *Forest Policy and Economics*. 14(1): 148–155.
- Kamoto, J., Clarkson, G., Dorward, P., Shepherd, D. 2013. Doing more harm than good? Community based natural resource management and the neglect of local institutions in policy development. *Land Use Policy*. 35:293–301.
- Kariarta, I. W. 2019. Kontemplasi di antara mitos dan realitas. *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. 1(1): 37-47.
- Kartodihardjo, H. 2006. Masalah kelembagaan dan arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 3 (1): 29-41.
- Kristin, Y., Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2018. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 1-8.
- Laksemi, N.P.S.T., Sulistyawati, E., Mulyaningrum. 2019. Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 150-163.
- Latupapua, Y.T., Loppies, R., Fara, F.D.S. 2019. Analisis kesesuaian kawasan mangrove sebagai objek daya tarik ekowisata di Desa Siahoni, Kabupaten Buru Utara Timur, Provinsi Maluku. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(3): 267-276.
- Lubis, R.S. 2019. *Peran Wanita Tani Hutan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Kasus di Hutan Rakyat Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus)*. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 66p.

- Maharaj, S.S., Asmath, H., Ali, S. Agard, J., Harris, S.A., New. M. 2018. Assessing protected area effectiveness within the Caribbean under changing climate conditions: A case study of the small island. *Land Use Policy*. 81: 185-193.
- Mamuko, F., Walangitan, H., Tilaar, W. 2016. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Eugenia*. 22(2): 80-92.
- Mangunjaya, F.M., Praharawati, G. 2019. Fatwas on boosting environmental conservation in Indonesia. *Religions*. 10(10): 570-584.
- Mardani, A., Purwanti, F., Rudiyanti, S. 2017. Strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang Provinsi Lampung. *Journal of Maquares*. 6(1):1-9.
- Marganingrum, D., Djuwansah, M.R., Mulyono, A. 2018. Penilaian daya tampung Sungai Jangkok dan Sungai Ancar terhadap polutan organik. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 19(1): 71-80.
- Marschke, M., Berkes, F. 2005. Local level sustainability planning for livelihoods: A cambodian experience. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*. 12: 21–33.
- Masterson, J.F. 2013. *Psychotherapy of the Borderline Adult: A Developmental Approach*. Book. Routledge. London. 40p.
- Michalena, E., Kouloumpis., Hills, J.M. 2017. Challenges for Pacific Small sland developing states in achieving their nationally determined contributions. *Energy Policy*. 114: 508-518.
- Ming'ate, F., Rennie, H., Memon, A. 2014. Potential for co-management approaches to strengthen livelihoods of forest dependent communities: A Kenyan case. *Land Use Policy*. 41:304–312.
- Mustika, I.Y., Kustanti, A., Hilmanto, R. 2017. Kepentingan dan peran aktor dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2): 113-127.
- Niapele, S. 2014. Kebijakan perlindungan hutan pada kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*. 7(1): 79-86.
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Book. Cambridge University Press. Cambridge.
- North, D.C. 1991. Institutions. *Journal of Economic Perspectives*. 5(1): 97-112.

- Novianti, L.E., Hamzah, H., Hariyadi, B. 2022. Kearifan lokal pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 22(1): 261-265.
- Oktoyoki, H., Suharjito, D., Saharuddin, S. 2016. Pengelolaan sumber daya hutan di Kerinci oleh kelembagaan adat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 3(1), 39-51.
- Onat, Y., Marchant, M., Francis, O.P., Kim, K. 2018. Coastal exposure of the Hawaiian Islands using GIS-based index modeling. *Ocean and Coastal Management*. 163: 113-129.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Pahlevi, T. 2007. *Persepsi Masyarakat terhadap Taman Wisata Alam Sicikeh-Cikeh (Studi Kasus di Dusun Pancur Nauli, Desa Lae Hole II, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Sumatera Utara)*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Pandey, S.S., Annapoorni, S., Malhotra, B.D. 1993. Synthesis and characterization of poly (aniline-co-o-anisidine). A processable conducting copolymer. *Journal Macromolecules*. 26(12): 3190-3193.
- Pfahl S. 2005. Institutional sustainability. *International Journal of Sustainable Development*. 8(1):80-96.
- Pigawati, B. 2005. Identifikasi potensi dan pemetaan sumber daya pesisir pulau-pulau kecil dan laut Kabupaten Natuna-Provinsi Kepulauan Riau. *Ilmu Kelautan*. 10(4): 229-236.
- Purnawibowo, S. 2014. Konservasi berbasis kearifan lokal di situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*. 8(2): 32-41.
- Putra, H.S. 2001. *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. (Skripsi). Universitas Sintuwu Maroso. Poso.
- Putri, D.A.E. 2016. Kearifan ekologi masyarakat Bayung Gede dalam pelestarian hutan setra ari-ari di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Unud*. 15(2): 22-30.
- Rahmawati, H. 2016. Local wisdom dan perilaku ekologis masyarakat Dayak Benuaq Indigenous. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. 13(1):72-78.
- Rawanda, R., Winarno, G.D., Febryano, I.G., Harianto, S.P. 2020. Peran folklore dalam mendukung pelestarian lingkungan di Pulau Pisang. *Journal of Tropical Marine Science*. 3(2): 74-82.

- Rohman, F., Laili, R. 2018. Keris dalam tradisi santri dan abangan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. 6(1): 79-98.
- Romdhoni, A. 2015. Tradisi hafalan Qur'an di masyarakat muslim Indonesia. *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*. 4(1): 1-18.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya, M.E., Papilaya, R. 2015. Cultural capital of the communities in the mangrove conservation in the coastal areas of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*. 222-229.
- Samudra, K., Baskoro, M.S., Wisudo, S.H., Iskandar, B.H. 2010. Potensi wisata bahari pulau-pulau kecil di Kawasan Kapoposang Kabupaten Pangkep. *Marine Fisheries*. 1(1): 87-96.
- Sangha, K.K., Maynard, S., Pearson, J., Dobriyal, P., Badola, R., Hussain, S.A. 2019. Recognising the role of local and indigenous communities in managing natural resources for the greater public benefit: Case studies from Asia and Oceania region. *Ecosystem Services*. 39:100991.
- Sari, N., Golar., Toknok, B. 2013. Kelembagaan kelompok tani hutan program pendampingan SCBFWM di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Jurnal Warta Rimba*. 1(1): 9-16.
- Scandurra, G., Romano, A.A., Ronghi, M., Carfora, A. 2018. On the vulnerability of small island developing states: A dynamic analysis. *Ecological Indicators*. 84: 382-392.
- Schmid A.A. 2004. *Conflict and Cooperation Institutional and Behavioral Economics*. Book. Blackwell Publishing. New Jersey.
- Siahaya, M., Salampessy, M., Febryano, I.G., Rositah, R., Ichsan, A.C. 2016. Partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi hutan mangrove di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*. 16(1): 12-17.
- Sinery, A.S., Manusawai, J. 2016. Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan Hutan Lindung Wosi Remdani. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23(3): 394-401.
- Sitaniapessy, R.H. 2002. *Segmentasi Pasar Produk Minuman dalam Kemasan*. (Tesis). Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Siu, J.C., Fu, N., Lin, S. 2020. Catalyzing electrosynthesis: a homogeneous electrocatalytic approach to reaction discovery. *Accounts of Chemical Research*. 53(3): 547-560.

- Sondakh, V.S., Suhaeni, S., Lumenta, V. 2019. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akulturasi*. 7(1): 1049-1058.
- Steele, M.Z., Shackleton, C.M., Shaanker, R.U., Ganeshiah, K.N., Radloff, S. 2015. The influence of livelihood dependency, local ecological knowledge and market proximity on the ecological impacts of harvesting non-timber forest products. *Forest Policy and Economics*. 50: 285-291.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Buku. Alfabeta. Bandung. 334p.
- Sukwika, T. 2018. Analisis aktor dalam perumusan model kelembagaan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 2(2): 133-150.
- Sumawidjaja, N. dan Suherman, D. 2005. *Ketersediaan Air Sebagai Faktor Pembatas Pengembangan Pulau Mangole, Maluku Utara*. Buku. LIPI Press. Bandung.
- Syahyuti. 2003. Alternatif konsep kelembagaan untuk penajaman operasional dalam penelitian sosiologi. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 21(2): 113-127.
- Tahir, A., Boer, M., Susilo, B.S., Jaya, I. 2009. Indeks kerentanan pulau-pulau kecil: Kasus Pulau Barrang Lompo-Makassar. *Imu Kelautan*. 14(4): 183-188.
- Taramelli, A., Valentini, E., Sterlacchini, S. 2015. A GIS-based approach for hurricane hazard and vulnerability assessment in the Cayman Islands. *Ocean & Coastal Management*. 108: 116-130.
- Tole, L. 2010. Reforms from the ground up: a review of community-based forest management in tropical developing countries. *Environmental Management* 45: 1312–1331.
- Ummanah, U. 2013. Sasi laut komunitas nelayan di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 18(3): 174-183.
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. Book. Kumarian Press. New York.
- Uphoff N. 1992. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development, Gatekeeper*. International Institute for Environment and Development. London.

- Uphoff, N. 1994. *Revisiting Institution Building: How Organizations Become Institutions*. Book. Institute of Contemporary Studies Press. San Francisco.
- Wahyuni, P., Febryano, I.G., Iswandar, D., Dewi, B.S. 2020. Sebaran lutung *Trachypithecus cristatus* (Raffles, 1821) di Pulau Pahawang, Indonesia. *Jurnal Belantara*. 3(2): 89-96.
- Yami, M., Vogl, C., Hausera, M. 2009. Comparing the effectiveness of informal and formal institutions in sustainable common pool resources management in Sub-Saharan Africa. *Conservation and Society*. 7(3): 153-164.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yulianda, F., Fahrudin, A., Hutabarat, Armin, A., Sri, H., Kusharjani, Sang K.H. 2010. *Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Pusdiklat Kehutanan dan SECEM-Korea International Cooperation Agency. Bogor.
- Zenteno, M., Zuidema, P., De Jong, W., Boot, R. 2013. Livelihood strategies and forest dependence: New insights from Bolivian forest communities. *Forest Policy and Economics*. 26: 12– 21.